

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk menjadi arahan dalam penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan di tahun 2023 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Rencana kerja ini merupakan dokumen turunan dari dokumen Rencana Strategis Tahun 2023-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Masa Renja tahun 2023 merupakan tahun pertama pada periode Renstra Tahun 2023-2026, sehingga baik nomenklatur kegiatan, sub kegiatan maupun indikator dan targetnya mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Masa renja tahun 2023 juga memiliki kondisi yang berbeda yang belum pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dimana pada tahun 2023 Kota Cimahi tidak memiliki Kepala Daerah terpilih.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Akhir kata, kami berharap agar dokumen Rencana Kerja ini dapat memberikan manfaat maksimal khususnya bagi pengembangan berkelanjutan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi.

Cimahi, Juli 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA CIMAHI**

Dra. IPAHA LATIPAH, M.Si
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19650227 199102 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu ,,,.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Tahun 2021	19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	20
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	34
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	34
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	35
3.3. Program dan Kegiatan	39
BAB VI PENUTUP	44

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

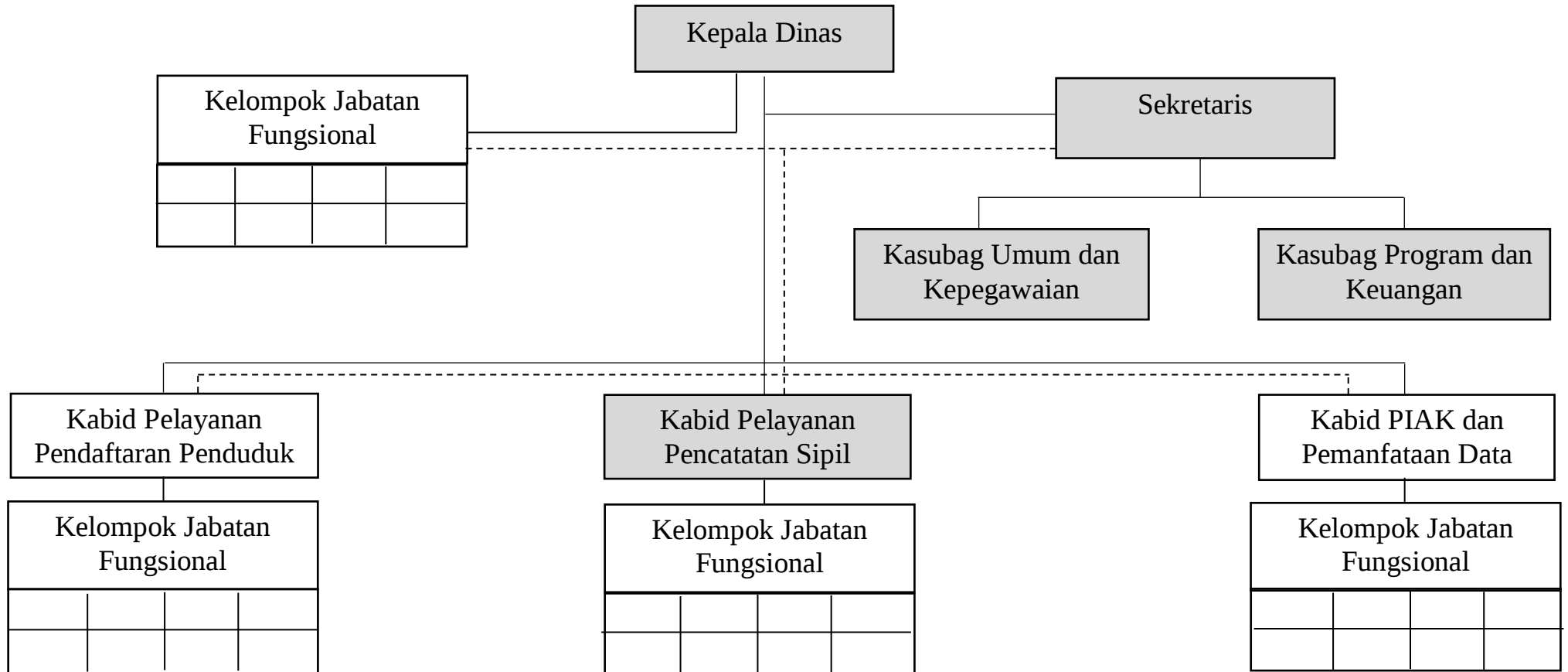
Pemerintah Daerah Kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Kepala Daerah dengan kewenangan yang meliputi:

- a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- b. Pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang administrasi kependudukan.
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- e. Pelaksanaan Kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan.
- f. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kota.
- g. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- h. Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak/tanpa dipungut biaya.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menunjukkan makin seriusnya upaya pemerintah dalam penataan yang berkaitan dengan kependudukan.

Pembentukan Dinas kependudukan yang organisasinya mandiri dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4750) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 tahun 2008 tentang Dinas Daerah, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 tahun 2011 tentang Dinas Daerah sebagai suatu langkah desain organisasi yang tepat.

Struktur Organisasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi
 (Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021)



Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah suatu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, suatu manifestasi dari rentetan Rencana Strategis Dinas untuk masa Renstra yang diarahkan pada visi dan misi kota, arah dan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RPJMD Provinsi Jawa Barat dan tak ketinggalan arah kebijakan Nasional tentang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang makin dinamis.

Seiring dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah Kota Cimahi di Tahun 2022 maka berakhir juga periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

Berbeda dengan proses pergantian kepala daerah sebelumnya dimana biasanya sebelum masa jabatan suatu kepala daerah berakhir sebelumnya sudah dilaksanakan proses pemilihan umum calon kepala daerah hingga telah terdapat calon terpilih yang akan langsung dilantik saat masa jabatan kepala daerah sebelumnya berakhir, namun untuk kali ini, pelaksanaan pemilukada baru akan dilaksanakan pada kegiatan pilkada serentak tahun 2024 sehingga sejumlah daerah yang masa jabatannya berakhir di tahun 2022 dan 2023 dimana didalamnya termasuk Kota Cimahi akan mengalami kekosongan jabatan kepala daerah. Dalam rangka mengisi kekosongan tersebut, sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (9) disebutkan bahwa untuk mengisi kekosongan kepala daerah tersebut, akan diisi dengan penjabat gubernur atau penjabat bupati/walikota sampai dengan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2024.

Kekosongan Kepala Daerah terpilih tersebut juga berimbas kepada ketiadaan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) karena sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 RPJMD adalah merupakan penjabaran visi, misi dan program seorang kepala daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, keluarlah Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 dimana disebutkan bahwa Kepala Daerah yang jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana

Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 selain itu Kepala Daerah juga diminta untuk memerintahkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026. Dengan demikian, RPD sebenarnya mempunyai fungsi yang sama dengan RPJMD yakni sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang membedakan hanya waktu penggunaannya saja yakni hanya selama terjadi masa kekosongan Kepala Daerah.

Rencana Kerja Tahun 2023 akan menjadi tahun pertama dalam rangkaian pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026. Karena mengacu pada dokumen rencana kerja jangka menengah yang baru maka pada Renja Tahun 2023 ini akan terdapat banyak perubahan dibandingkan dengan dokumen renja tahun sebelumnya yang dimana masih mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah yang lama.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menuangkan rencana program dan kegiatannya ke dalam Renja OPD yang berorientasi pada Pelayanan Publik tujuannya diarahkan pada pemenuhan hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi, meningkatkan kesadaran penduduk untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan, menyediakan database kependudukan yang lengkap dan akurat, mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional dan lokal serta untuk penerbitan dokumen kependudukan yang legalitasnya diakui semua pihak.

Sebagai bentuk kajian perencanaan dengan pertimbangan berbagai aspek maka pendekatan yang digunakan yaitu:

- a) Pendekatan Politik; merupakan penjabaran agenda-agenda pembangunan berdasarkan kebijakan Kepala Daerah maupun aspirasi masyarakat melalui DPRD.
- b) Pendekatan Tekhnokratik; yaitu menggunakan metode dan kerangka ilmiah yang dilaksanakan secara fungsional, kewilayahan, lintas sektor dan lintas pelaku.
- c) Pendekatan Partisipatif; yaitu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan.
- d) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, yaitu dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan melalui musyawarah.

Dengan tersusunnya Renja ini diharapkan dapat meningkatkan peran dinas dalam mewujudkan **Good Governance** dan sekaligus mewujudkan Visi dan Misi Kota Cimahi.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja ini adalah sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cimahi; (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 177);
21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
22. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 276);
23. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas pada Dinas Daerah Kota Cimahi;
24. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 660, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 140).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi Tahun 2023 yaitu mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan yang berbeda-beda serta mewujudkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai Pedoman rencana organisasi dalam mewujudkan program dan kegiatan pelayanan publik yang lebih baik dan berkesinambungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum sebagai bahan pijakan penyusunan kebijakan, maksud dan tujuan dalam penyusunan Renja serta sistematika penulisan.

Bab 2 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

Memuat hasil capaian baik segi sasaran maupun Kegiatan oleh OPD Tahun 2022, analisa kinerja pelayanan Disdukcapil yang tertuang dalam hasil pencapaian SPM, isu atau pokok utama yang terkait dengan permasalahan pelaksanaan Tupoksi, Review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan beberapa usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

Bab 3 Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan

Dimulai dengan identifikasi Kebijakan Nasional dengan tetap mengacu pada skala global dielaborasi kedalam RPJMD Provinsi, Kota serta Renja SKPD; tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta rincian program/Kegiatannya.

Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat tentang program dan kegiatan beserta pendanaannya

Bab 5 Penutup

Memuat kaidah-kaidah sebagai pedoman dan komitmen Kepala Dinas dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi yang makin dinamis.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, akuntabel yakni kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan termasuk dalam hal pelaporan maka metoda yang dipakai adalah melakukan pengukuran kinerja sebagai bahan evaluasi kinerja, sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan Kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja Kegiatan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Renja memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Masalah pokok yang dominan dalam penataan administrasi kependudukan yaitu masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dan melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya. Selain itu pengetahuan masyarakat tentang tata cara pengurusan administrasi kependudukan yang baik dan benar juga masih relatif rendah. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat menjadi cukup penting, menambah format sosialisasi kedalam bentuk yang lebih menarik, lebih mengena dan lebih mudah diingat dan dipahami menjadi salah satu tugas penting di tahun 2023. Cara lainnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat diantaranya juga dengan membangun bentuk pelayanan yang lebih memudahkan

masyarakat. Pada tahun 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi dengan bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berhasil mengembangkan aplikasi pelayanan daring administrasi kependudukan yang sangat memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, dimana masyarakat bisa melakukan pengajuan pelayanan dimanapun dan kapanpun dengan proses yang lebih transparan. Namun sangat disayangkan dengan di awal tahun 2022 aplikasi pelayanan tersebut harus terhenti dengan adanya kebijakan SIAK terpusat dari Kementerian Dalam Negeri. Salah satu kemudahan lainnya yaitu dengan adanya kegiatan pelayanan di hari libur, pelayanan melalui mobil keliling, pelayanan jemput bola ke sekolah untuk KTP-el pemula dan KIA, pelayanan jemput bola perekaman KTP-el bagi warga lansia/disabilitas dan kegiatan pelayanan RW Tuntas.

Dalam pelaksanaan program dan Kegiatan ditahun 2021 terdapat 1 (satu) Urusan Wajib, didukung 5 (lima) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Kegiatan dengan target dan realisasi seperti pada penjelasan tabel **Tabel 2.1.** Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021.

Hampir semua tingkat realisasi capaian target indikator program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pelaksanaan renja tahun 2021 sudah mencapai 100%. Hanya beberapa saja yang nilainya masih rendah. Yang terendah yaitu realisasi cakupan penerbitan kartu keluarga yang hanya mencapai 66%. Namun nilai yang rendah ini diduga akibat kekurangvalidan data terkait kepemilikan kartu keluarga yang ada dalam database kependudukan, dimana banyak diantaranya penduduk yang sudah memiliki kartu keluarga namun dalam database belum tercatat memiliki kartu keluarga.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	100	-	100	100	100%	100	100	100%
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100	-	100	86	86%	100	88	88%
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	-	BB	BB	100%	BB	BB	BB
	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	40	-	20	20	100%	20	40	100%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	20	-	10	10	100%	10	20	100%
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	20	-	10	10	100%	10	20	100%

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Akhir Tahun dan Semester	4	-	2	2	100%	2	4	100%
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	84	-	42	38	90%	42	77	92%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	2	-	1	1	100%	1	2	100%
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semester	2	-	1	1	100%	1	2	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang meningkat Disiplin dan Kapasitasnya	120	-	60	60	100%	60	120	100%
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang diberikan bimbingan	120	-	60	60	100%	60	120	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum	24	-	12	12	100%	12	24	100%
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan perlengkapan/peralatan kantor	24	-	12	12	100%	12	24	100%
		Jumlah bulan Penyediaan ATK	24	-	12	12	100%	12	24	100%
		Jumlah set peralatan dan peralatan kantor	4	-	2	2	100%	2	4	100%
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	30	-	15	14	93%	15	29	97%
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24	-	12	12	100%	12	24	100%

10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	24	-	12	12	100%	12	24	100%
11	Fasilitas Kunjungan tamu	Jumlah Bulan Fasilitas Kunjungan Tamu	24	-	12	12	100%	12	24	100%
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Koordinasi dan Konsultasi	24	-	12	12	100%	12	24	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	1	-	1	1	100%	1	1	100%
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Fasilitas Gedung Kantor, Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	2	-	1	1	100%	1	2	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24	-	12	12	100%	12	24	100%
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24	-	12	12	100%	12	24	100%
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	24	-	12	12	100%	12	24	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	24	-	12	12	100%	12	24	100%

16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24	-	12	12	100%	12	24	100%
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk										
	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	99%	-	99%	97,5%	98%	99%	98%	99%
		Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	99%	-	99%	62,3%	63%	99%	65%	66%
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			-						
1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah lokasi pendataan Penduduk Non Permanen dan rentan Adminduk	6	-	3	3	100%	3	6	100%
2	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan dokumen pendaftaran penduduk	320.000	-	160.000	179.502	112%	160.000	325000	102%
3	Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah dokumen Induk yang disusun	40	-	20	20	100%	20	40	100%
	Penataan Pendaftaran Penduduk			-						
	Pengadaan Dokumen Kependudukan Selain Blangko KTP-EL, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah blangko yang disediakan	20.000	-	0	0	-	20.000	30000	150%

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil										
	Program Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan Akta Kelahiran	55%	-	50%	49,94%	100%	55%	51%	93%
		Cakupan penerbitan Akta Kematian	80%	-	75%	78,83%	105%	80%	80%	100%
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan dokumen Pencatatan sipil	30.000	-	15.000	15.461	103%	15.000	30000	100%
1	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan dokumen Pencatatan Sipil	30.000	-	15.000	15.461	103%	15.000	30000	100%
Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data										
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Validitas database pelayanan kependudukan	95	-	92	82,79	90%	95	95	100%
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian database Kependudukan	Jumlah Instansi yang memanfaatkan data kependudukan	96	-	48	48	100%	48	96	100%
1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah buku agregat kependudukan yang dicetak	196	-	96	96	100%	100	192	98%
2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah perjanjian kerja sama dalam pemanfaatan data	4	-	2	2	100%	2	4	100%
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah bulan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	24	-	12	12	100%	12	24	100%
1	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah pemeliharaan konektivitas jaringan SIAK	38	-	19	19	100%	19	38	100%

2	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi	1.000	-	500	1.256	251%	500	1700	170%
3	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah modul dalam perancangan website dinas	4	-	2	2	100%	2	4	100%
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			-						
1	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah pesertabimbingan teknis	50	-	0	0	-	50	0	0%
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Instansi yang memanfaatkan profil kependudukan	92	-	90	100	111%	92	100	109%
	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Perangkat Daerah yang Memanfaatkan profil kependudukan	54	-	27	27	100%	27	54	100%
1	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain.	Jumlah Buku profil Kependudukan yang dicetak	74	-	37	37	100%	37	74	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 5 ayat (1) dapat dijelaskan bahwa eksistensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan pelayanan publik pada ruang lingkup pelayanan administratif yaitu yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam undang-undang dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda.

Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik perlu dilakukan evaluasi maupun standarisasi jenis pelayanan melalui suatu indikator yang jelas dan terukur yang akhirnya berdampak pada perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan. Salah satu ukuran atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Dokumen Kependudukan yaitu Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kelahiran dan Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kematian.

Pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi :

1. Pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan Adminduk;
2. Pencatatan peristiwa penting;
3. Penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk;
4. Penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil;
5. Perubahan akta catatan sipil karena terjadinya peristiwa penting.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu OPD pelayanan di Kota Cimahi yang melayani masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Sebagai unit pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kinerja sebagai berikut :

- a. Telah dilaksanakannya pelayanan kependudukan secara online menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang bekerja sama dengan pemerintah di kecamatan;
- b. Telah melaksanakan inovasi pelayanan publik dalam hal pelayanan dokumen kependudukan, yaitu dengan menerapkan sistem paket pelayanan “ *Three in one* ”, Pelayanan untuk penyandang disabilitas dan RW Tuntas yang merupakan pelayanan administrasi kependudukan langsung ke RW yang telah ditentukan;

- c. Telah melaksanakan pelayanan online baik melalui Whatsapp maupun aplikasi pelayanan. Untuk aplikasi pelayanan ini walaupun aplikasi pelayanan sebelumnya (SIPADE, SIBENAR) sempat terhenti di awal tahun 2022 akibat adanya kebijakan SIAK terpusat namun saat ini Disdukcapil Kota Cimahi sudah mengembangkan aplikasi pelayanan pengganti (DILANDA CITA) dimana saat ini sudah dalam tahapan uji coba.
- d. Telah melaksanakan stelsel aktif pemerintah dalam pelayanan administrasi kependudukan dengan sistem pelayanan keliling baik menggunakan mobil pelayanan keliling maupun ke rumah warga untuk pelayanan yang sakit, jompo dan atau disabilitas;
- e. Telah dilakukannya percepatan pelayanan perekaman KTP Elektronik ke sekolah- sekolah, pelayanan pada hari libur, sabtu dan minggu sehingga masyarakat lebih terbantu dalam pengurusan KTP Elektronik.

Asumsi Umum terhadap analisis kinerja pelayanan OPD dapat disimak melalui pencapaian target nasional sebagaimana tertera dalam matrik dibawah ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Disdukcapil
Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat

NO	Indikator	Target SPM Tahun 2020	IKK	Target RENSTRA-PD				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)			
1	Cakupan penerbitan KK	100%	Cakupan penerbitan KK	98,0%	99,0%	99,0%		90,6 %	85,6 %	76,4 %	62,3 %	65,0 %		Pada Renstra 2023-2026 dihilangkan karena ketersediannya datanya kurang akurat
2	Cakupan penerbitan KTP-EL	100%	Cakupan penerbitan KTP-EL	98,0%	99,0%	99,0%	99,0%	95,6 %	98,9 %	98,6 %	97,5 %	98,0 %	99,0 %	
3	Cakupan penerbitan Kutipan akte kelahiran	90%	Cakupan penerbitan Kutipan akte kelahiran	82,0%	50,0%	55,0%		45,1 %	47,3 %	48,2 %	49,9 %	51,0 %		Pada Renstra 2023-2026 dirubah jadi khusus umur 0-17 tahun
4	Cakupan penerbitan Kutipan akte kematian	70%	Cakupan penerbitan Kutipan akte kematian	75,0%	75,0%	80,0%		61,4 %	68,7 %	80,0 %	95,6 %	80,0 %		Pada Renstra 2023-2026 rumusnya dirubah sesuai yang rumus terbaru yang digunakan di kemendagri saat ini

Dari matrik diatas dapat di analisis bahwa pencapaian SPM belum maksimal dikarenakan beberapa kendala umum yang biasa terjadi hampir di seluruh kota dan kabupaten dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Pencapaian target SPM cakupan KTP meningkat sedangkan KK menurun diakibatkan sebagai dampak dari hasil pelaksanaan Kegiatan pengembangan database kependudukan, penekanan pada pelaksanaan LAMPID (Pelaporan Lahir, Mati, Pindah, Datang) dengan indikator pencapaian akurasi dan validitas data.

Pada pencapaian cakupan pelayanan kutipan akta kelahiran dan akta kematian memang disadari masih jauh dari harapan apalagi dihadapkan dengan indikator SPM yang dinamis di satu sisi dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya. Upaya pelayanan secara jemput bola di masing-masing kelurahan (15 kelurahan) dalam rangka pembuatan akte kelahiran dan gratis belumlah merupakan solusi yang cukup.

Pencapaian target Nasional SPM 100% untuk cakupan KTP-el dan Kartu Keluarga pada renstra masih belum tercapai. Untuk kartu keluarga ada kecenderungan terdapat permasalahan dalam akurasi datanya.

Pada Pencapaian target Nasional SPM 90% untuk akte kelahiran dan 70% untuk akte kematian di tahun 2021 pada Disdukcapil Kota Cimahi masih menyisakan banyak pekerjaan rumah, perlu upaya yang extra maksimal dalam pencapaian target nasional tersebut. Upaya sosialisasi yang di sampaikan baik secara tatap muka, pelayanan secara jemput bola di 15 kelurahan dan adanya model baru pelayanan yang bersifat penyisiran di RW/RW tuntas administrasi kependudukan di 15 RW untuk 15 kelurahan, pencetakan Pamflet/brosur belum menjamin komunikasi dua arah antara pemerintah sebagai penyedia layanan dengan masyarakat sebagai pengguna layanan.

2.3 Isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana diutarakan terdahulu bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menunjukkan makin seriusnya upaya pemerintah dalam penataan yang berkaitan dengan kependudukan. Paradigma yang bergeser antara lain pelayanan semua dokumen kependudukan gratis; Azas pencatatan administrasi kependudukan berdasarkan peristiwa diubah ditempat domisili; pelaporan kematian menjadi

kewajiban RT (Rukun Tetangga) serta stelsel aktif dari aparaturnya pencatatan sipil.

Dengan diawali oleh Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009, berarti sudah dibuatnya satu **Key Word** yang menjadi koridor utama sistem administrasi kependudukan dalam pelayanan kependudukan itu sendiri.

Dengan perkembangan regulasi, pengembangan Informasi Teknologi serta respon atas kebutuhan pelayanan kepada masyarakat maka isu-isu penting yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Kendala ini memang menjadi hambatan berat bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, karena semakin banyaknya masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan dalam keterbatasan jumlah personil dalam pelayanan dan sarana/prasarana yang belum memadai. Hal ini terjadi karena semua pengurusan di unit pelayanan lain di Kota Cimahi sudah mewajibkan untuk melampirkan KTP, KK dan Akta Kelahiran sebagai lampiran persyaratan, sehingga permintaan pelayanan meningkat, sedangkan jumlah petugas pelayanan tetap.
2. Penguatan Data dan Informasi Kependudukan,
3. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pengurusan dokumen kependudukan.
4. Belum optimalnya kualitas pelayanan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan.
5. Keberadaan pandemi virus Covid-19 memaksa adanya perubahan dalam mekanisme pelayanan dikarenakan besarnya resiko penyebaran virus dalam mekanisme pelayanan saat ini sangat besar, hal tersebut dikarenakan banyaknya terjadi kerumunan dan interaksi fisik antar manusia. Adanya pelayanan non tatap muka (tanpa interaksi fisik) menjadi suatu keharusan sehingga perlu dibangun suatu mekanisme pelayanan baru yakni pelayanan secara daring yang mengacu pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

Memperhatikan isu tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa program kegiatan Disdukcapil menjadi program kegiatan prioritas Kota Cimahi dengan pencapaian visi dan misi Kota yaitu **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik**. Dampak yang diharapkan secara signifikan yaitu dengan meningkatnya nilai Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Disdukcapil.

Dalam rangka mengantisipasi isu tentang Tupoksi di atas maka perlu diidentifikasi beberapa permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tupoksi itu sendiri dan dapat ditelaah dalam matrik berikut:

Tabel.2.4
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi Disdukcapil

Aspek kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan
			Internal	External	
Pra Sarana	Kurang memadai	Analisa ruang	Gedung kantor		Kurang kenyamanan kerja
	Bergabung dengan DPMPTSP		Ruang pelayanan		Relative kurang memuaskan
	Sewa rumah untuk gudang arsip		Gudang Arsip		Arsip aktif rawan rusak dan hilang
	Kecil		Ruang Server		Tidak refresentatif
	Tidak ada		Ruang Perkawinan		
Sarana	Jumlah dan atau kondisi dan atau spesifikasi Peralatan pendukung pelayanan belum memadai	Analisa kebutuhan	Pendanaan Kurang		Pelayanan terganggu, kurang maksimal
SDM	Tidak memadai	Analisa Beban kerja	Jumlah SDM		
			Kualifikasi SDM		
Jaringan SIAK dan Data	Belum optimal	15 kel, 3 kec, 1 dinas dan pusat lancar	Penyusunan regulasi tingkat kota		Pelayanan belum maksimal
Validitas dan akurasi data	Masih terdapat data ganda, adanya penduduk yang sudah	Data DKB	Pendanaan kurang, Kesadaran masyaakat kurang		Validitas dan akurasi data kurang memadai

	meninggal namun masih terdata di database				
Demografi	Tidak adanya kegiatan Operasi Yustisi	Laju pertumbuhan penduduk alamiah		Laju pertumbuhan penduduk	banyak penduduk pendatang yang belum melapor.
Kesadaran Hukum	Akte kelahiran 49,9% Akte kematian	IKK/SPM		Kesadaran masyarakat	Capaian SPM kurang
Kebijakan Nasional	Terekam 97,5%	KTP-el 100%		Penerapan ktp-el bagi semua penduduk	Capaian belum maksimal

Dari matriks di atas dapat dijelaskan kembali sebagai berikut:

1. Faktor Intern Organisasi

- a. Belum refresentatifnya ruang pelayanan dan ruang kerja (ruang data, gudang arsip dan ruang perkawinan bagi non muslim) dibandingkan dengan rasio kebutuhan ruangan dari sebuah dinas.
- b. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia baik yang terkait langsung dengan penanganan tekhnis administratif, produk hardcopy/kearsipan maupun yang berbasis Informasi tekhnologi.
- c. Belum mantapnya sinkronisasi koordinasi masing-masing unsur pelaksana di tingkat kelurahan dan kecamatan dan instansi vertikal dalam penanganan pelayanan.
- d. Masih kurangnya alat dan peralatan serta jaringan yang mendukung kelancaran tugas di masing-masing tingkatan organisasi.
- e. Budaya kerja yang masih lemah.
- f. Belum optimalnya pengembangan kinerja organisasi.
- g. Belum memadainya sarana dan prasarana.

2. Faktor Ektern Organisasi

- a. Tingginya kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk terutama yang disebabkan oleh faktor migrasi/urbanisasi sedangkan jumlah lahan terbatas.
- b. Masih kurang kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan akta kelahiran, akta kematian, KTP-el, KK
- c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan aparat penyelenggara administrasi kependudukan dalam melaporkan peristiwa kependudukan.

Meskipun banyak hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan tupoksi pada prinsipnya secara keseluruhan relative tidak terpengaruh dengan visi dan misi kepala daerah, provinsi, nasional maupun internasional /MDGs mengingat Tupoksi yang dijalankan sebagai lembaga administratif yang diamanatkan dalam Undang-undang.

Mengingat perubahan “*mindset*” Negara dalam penanganan administrasi kependudukan sebagai suatu yang strategis, tantangan yang timbul justru ada pada sikap proaktif aparat, dukungan pendanaan yang memadai sekaligus sebagai bentuk peluang dari lembaga pelaksana dalam mengembangkan potensi guna di dapat tingkat cakupan pelayanan

Sebagai Organisasi dilevel eselon II maka memiliki kewenangan yang lebih dibandingkan sebelumnya. Beberapa rekomendasi atau catatan penting yang menjadi fokus dengan cara mengembangkan aplikasi SIAK kependudukan sampai di tingkat kelurahan, penyisiran melalui RW tuntas secara bertahap dan dinamis, pengembangan pelayanan online, pelayanan penyandang disabilitas dan pelayanan mobil keliling serta pengembangan model sosialisasi yang lebih baik.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bentuk kajian perencanaan dengan pertimbangan berbagai aspek maka dalam penelaahan usulan, pendekatan yang digunakan sebagaimana dikemukakan dalam bab pendahuluan, salah satunya Pendekatan *Top-Down* dan *Bottom-Up*, yaitu dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan melalui musyawarah.

Dari hasil pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang diawali oleh Forum RW pada Bulan Januari 2022 dengan *Leading sector* Bappelitbangda Kota Cimahi dan prosesnya dimulai dari Tingkat RT sampai dengan Tingkat Kota Cimahi maka didapat beberapa usulan program dan Kegiatan yang terkait dengan Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

Tabel 2.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Disdukcapil Kota Cimahi Tahun 2022

PRIORITAS USULAN	KECAMATAN PENGUSUL
Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (Termasuk KK, KTP, Akte Kelahiran)	Cimahi Utara, Cimahi Tengah
Penertiban Administrasi Kependudukan	Cimahi Utara, Cimahi Tengah
Pemutakhiran Data Kependudukan	Cimahi Utara, Cimahi Selatan
Digitalisasi Pelayanan Administrasi	Cimahi Selatan
Sosialisasi kebijakan kependudukan	Cimahi Utara

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , disajikan pada **table 2.4** .

Tabel 2.4
Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisa Kebutuhan									
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				11.370.058.000	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				11.370.058.000
2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.519.058.000	2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.519.770.402
2	12	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				105.000.000	2	12	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				80.523.300
2	12	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cimahi	10 Dokumen	50.000.000	2	12	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cimahi	10 Dokumen	49.999.000
2	12	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cimahi	14 Laporan	55.000.000	2	12	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cimahi	14 Laporan	30.524.300
2	12	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.560.058.000	2	12	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.560.058.000
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Cimahi	45 Orang/ bulan	7.550.058.000	2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Cimahi	45 Orang/ bulan	7.550.058.328

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisa Kebutuhan									
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cimahi	1 Laporan	5.000.000	2	12	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cimahi	1 Laporan	5.000.000
2	12	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cimahi	1 Laporan	5.000.000	2	12	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cimahi	1 Laporan	5.000.000
2	12	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				240.000.000	2	12	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				239.749.750
2	12	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cimahi	1 Paket	130.000.000	2	12	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cimahi	1 Paket	129.750.000
2	12	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Cimahi	66 Orang	110.000.000	2	12	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Cimahi	66 Orang	109.999.750
2	12	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.053.000.000	2	12	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.098.755.954

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisa Kebutuhan									
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cimahi	3 Paket	550.000.000	2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cimahi	3 Paket	595.938.354
2	12	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cimahi	1 Paket	13.000.000	2	12	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cimahi	1 Paket	12.850.470
2	12	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cimahi	2 Paket	60.000.000	2	12	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cimahi	2 Paket	59.977.220
2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cimahi	2 Paket	90.000.000	2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cimahi	2 Paket	89.999.910
2	12	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cimahi	4 Laporan	10.000.000	2	12	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cimahi	4 Laporan	10.000.000
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cimahi	50 Laporan	300.000.000	2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cimahi	50 Laporan	299.990.000
2	12	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cimahi	1 Dokumen	30.000.000	2	12	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cimahi	1 Dokumen	30.000.000
2	12	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				85.000.000	2	12	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				83.250.000

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisa Kebutuhan									
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Cimahi	1 Unit	85.000.000	2	12	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Cimahi	1 Unit	83.250.000
2	12	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				116.000.000	2	12	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				114.223.950
2	12	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cimahi	12 Laporan	21.000.000	2	12	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cimahi	12 Laporan	19.224.000
2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cimahi	12 Laporan	95.000.000	2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cimahi	12 Laporan	94.999.950
2	12	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				360.000.000	2	12	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				343.232.120
2	12	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Cimahi	4 Unit	230.000.000	2	12	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Cimahi	4 Unit	213.298.120
2	12	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cimahi	90 Unit	130.000.000	2	12	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cimahi	90 Unit	129.934.000

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisa Kebutuhan									
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				519.000.000	2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				518.861.448
2	12	2	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk				346.000.000	2	12	2	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk				345.916.448
2	12	2	2.01	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Cimahi	800 Dokumen	26.000.000	2	12	2	2.01	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Cimahi	800 Dokumen	25.972.000
2	12	2	2.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cimahi	12 Laporan	320.000.000	2	12	2	2.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cimahi	12 Laporan	319.944.448
2	12	2	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk				102.000.000	2	12	2	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk				101.990.000
2	12	2	2.02	2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Cimahi	17000 Dokumen	102.000.000	2	12	2	2.02	2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Cimahi	17000 Dokumen	101.990.000
2	12	2	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				71.000.000	2	12	2	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				70.955.000

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisa Kebutuhan									
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	2	2.03	2	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Cimahi	900 Dokumen	35.000.000	2	12	2	2.03	2	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Cimahi	900 Dokumen	34.955.000
2	12	2	2.03	5	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	Cimahi	3 Laporan	36.000.000	2	12	2	2.03	5	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	Cimahi	3 Laporan	36.000.000
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				614.000.000	2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				612.433.200
2	12	3	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil				380.000.000	2	12	3	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil				378.991.200
2	12	3	2.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Cimahi	4 Layanan	380.000.000	2	12	3	2.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Cimahi	4 Layanan	378.991.200
2	12	3	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				149.000.000	2	12	3	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				148.608.000
2	12	3	2.02	4	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Cimahi	12 Laporan	74.000.000	2	12	3	2.02	4	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Cimahi	12 Laporan	73.703.000
2	12	3	2.02	6	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Cimahi	10 Laporan	75.000.000	2	12	3	2.02	6	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Cimahi	10 Laporan	74.905.000

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisa Kebutuhan									
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	3	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				85.000.000	2	12	3	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				84.834.000
2	12	3	2.03	4	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Cimahi	1 Laporan	85.000.000	2	12	3	2.03	4	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Cimahi	1 Laporan	84.834.000
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				688.000.000	2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				688.993.050
2	12	4	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				118.000.000	2	12	4	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				117.326.950
2	12	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Cimahi	2 Dokumen	100.000.000	2	12	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Cimahi	2 Dokumen	99.326.950
2	12	4	2.01	2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Cimahi	5 Dokumen	18.000.000	2	12	4	2.01	2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Cimahi	5 Dokumen	18.000.000
2	12	4	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				460.000.000	2	12	4	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				460.992.900
2	12	4	2.03	3	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cimahi	12 Laporan	215.000.000	2	12	4	2.03	3	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cimahi	12 Laporan	215.299.950
2	12	4	2.03	7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Cimahi	12 Laporan	245.000.000	2	12	4	2.03	7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Cimahi	12 Laporan	245.692.950
2	12	4	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				110.000.000	2	12	4	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				110.673.200

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisa Kebutuhan									
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	4	2.04	3	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Cimahi	1 Laporan	110.000.000	2	12	4	2.04	3	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Cimahi	1 Laporan	110.673.200
2	12	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				30.000.000	2	12	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				29.999.900
2	12	5	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan				30.000.000	2	12	5	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan				29.999.900
2	12	5	2.01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Cimahi	1 Dokumen	30.000.000	2	12	5	2.01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Cimahi	1 Dokumen	29.999.900
TOTAL									11.370.058.000	TOTAL									11.370.058.000

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sinergitas kebijakan, sinkronisasi program secara vertikal antar tingkatan pemerintahan yang berbeda; antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maka penyusunan RPJMD mengacu pada RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJM Provinsi, Renstra Provinsi harus di bangun.

Salah satu isu strategis yang ditetapkan dalam Renstra Kemendagri Tahun 2019-2024 adalah mengenai Tata kelola pemerintahan daerah dan desa dimana dalamnya diantaranya membahas Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Terkait dengan penerapan SPBE dalam bidang administrasi kependudukan disebutkan mengenai terbangunnya Big Data Kependudukan, Indonesia menuju era integrasi data berbasis data kependudukan.

Dengan adanya kebutuhan pemanfaatan data kependudukan bagi berbagai kepentingan layanan publik tersebut, dilakukan telaahan untuk menserasikan, mensinkronkan dan mensinergikan pencapaian sasaran pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023-2026.

Masih dalam renstra Kemendagri, dalam bahasan Tata kelola pemerintahan daerah dan desa, dalamnya juga terdapat poin mengenai Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yang terdiri dari :

- a) Pencapaian target nasional penerbitan akta kelahiran bagi anak belum merata persentasenya di setiap daerah.
- b) Tuntutan kebutuhan layanan pencatatan sipil secara meluas kepada seluruh warga negara termasuk di luar negeri.
- c) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan.
- d) Sarana prasarana sistem informasi administrasi kependudukan beberapa diantaranya telah memasuki masa *out of product*, *out of service*, dan *out of sale.rare*

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan identifikasi masalah, sasaran dan arah kebijakan pemerintah maka tujuan yang ingin dicapai/direncanakan dalam tahun 2023-2026 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan salah satu misi Kota Cimahi yakni :

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur dan relevan dan dapat dilaksanakan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik;

Indikatornya adalah :

- Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah

2. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Kualitas Pelayanan Publik;

Indikatornya adalah :

- Indeks Kepuasan Masyarakat
- Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el, KIA, Akte kelahiran 0-18 tahun)

3. Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan

Indikatornya adalah :

- Prosentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berupa hak akses data dan atau tabulasi data

3.3 Program Dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan tujuan dan sasaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian diperbaiki melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah, maka nomenklatur program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hampir keseluruhannya mengalami perubahan.

Adapun rencana pelaksanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2022 sebanyak 5 program, 17 kegiatan dan 33 Sub Kegiatan yaitu :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar
 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung Kantor
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

B. Program Pendaftaran Penduduk

- a. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebesar
 - 1. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan sebesar
 - 2. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- b. Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk
 - 1. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan
- c. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
 - 1. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
 - 2. Sosialisasi Pendaftaran Penduduk

C. Program Pencatatan Sipil

- a. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil
 - 1. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - 1. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil
 - 2. Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil
- c. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - 1. Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil

D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- a. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian database Kependudukan
 - 1. Pengolahan dan Penyajian data Kependudukan
 - 2. Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
- c. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
1. Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

E. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

- a. Penyusunan Profil Kependudukan sebesar
 1. Penyusunan Profil data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Eksistensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu menyelenggarakan pelayanan publik pada ruang lingkup pelayanan administratif yaitu yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam undang-undang dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda.

Dalam menuangkan rencana program dan Kegiatannya kedalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi yang berorientasi pada Pelayanan Publik tujuannya diarahkan pada pemenuhan hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi, meningkatkan kesadaran penduduk untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan, menyediakan database kependudukan yang lengkap dan akurat, mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional dan lokal serta untuk penerbitan dokumen kependudukan yang legalitasnya diakui semua pihak.

Guna menjaga kesinambungan dan perubahan kebijakan nasional, Disdukcapil merumuskan program dan kegiatan tahun 2023 yang terdiri dari 5 (lima) Program, 17 (empat belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 11.370.058.000,- (Sebelas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)**.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan sebagaimana terlampir dalam **Tabel 4.1**.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						518.861.448			531,000,000	
2	12	2	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk						345.916.448			357,000,000	
2	12	2	2.01	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terkait pendaftaran penduduk	99 persen	800 Dokumen	12 bulan	25.972.000	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	99 persen	27,000,000
2	12	2	2.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terkait pendaftaran penduduk	90 persen	12 Laporan	12 bulan	319.944.448	Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak	90 persen	330,000,000
				Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk				99 persen	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk				99 persen		
2	12	2	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk						101.990.000			102,000,000	
2	12	2	2.02	2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Terpenuhinya kebutuhan penataan pendaftaran penduduk	90 persen	17000 Dokumen	12 bulan	101.990.000	Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak	90 persen	102,000,000
2	12	2	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						70.955.000			72,000,000	
2	12	2	2.03	2	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa	Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan	Terlaksananya pendukung	90 persen	900 Dokumen	12 bulan	34.955.000	Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak	90 persen	36,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk	99 persen				Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	99 persen	
2	12	2	2.03	5	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak	Jumlah Laporan Hasil Sosialiase Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya pendukung penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk	90 persen	3 Laporan	12 bulan	36.000.000	Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak	90 persen	36,000,000
					Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk				99 persen				Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	99 persen	
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL							612.433.200	619,000,000		
2	12	3	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil							378.991.200	380,000,000		
2	12	3	2.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terkait dokumen pencatatan sipil	100 persen	4 Layanan	12 bulan	378.991.200	Cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100 persen	380,000,000
					Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun				96 persen				Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	96 persen	
					Cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraian nya dilaporkan				100 persen				Cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraian nya dilaporkan	100 persen	
					Cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan non muslim pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan				100 persen				Cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan non muslim pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100 persen	
2	12	3	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil							148.608.000	152,000,000		
2	12	3	2.02	4	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait	Cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraian nya dilaporkan	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan	Terlaksananya pendukung penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil	100 persen	12 Laporan	12 bulan	73.703.000	Cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraian nya dilaporkan	100 persen	76,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan non muslim pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil		100 persen				Cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan non muslim pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100 persen	
2	12	3	2.02	6	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Terlaksananya pendukung penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil	100 persen	10 Laporan	12 bulan	74.905.000	Cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100 persen	76,000,000
2	12	3	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil							84.834.000			87,000,000
2	12	3	2.03	4	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Terselengaranya pelayanan pencatatan sipil yang optimal	100 persen	1 Laporan	12 bulan	84.834.000	Cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100 persen	87,000,000
				Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	96 persen	Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun			96 persen						
				Cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	100 persen	Cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan			100 persen						
				Cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan non muslim pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100 persen	Cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan non muslim pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan			100 persen						
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							688.993.050			709,500,000
2	12	4	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan							117.326.950			122,000,000
2	12	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan melalui hak akses data	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Termanfaatkannya data kependudukan oleh stakeholder dan masyarakat	30 persen	2 Dokumen	12 bulan	99.326.950	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan melalui hak akses data	30 persen	102,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	4	2.01	2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan melalui hak akses data	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Termanfaatkannya data kependudukan oleh stakeholder dan masyarakat	30 persen	5 Dokumen	12 bulan	18.000.000	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan melalui hak akses data	30 persen	20,000,000
2	12	4	2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								460.992.900			475,000,000
2	12	4	2.03	3	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	SLA berjalannya SIAK dan KTP-el	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terselenggaraanya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	90 persen	12 Laporan	12 bulan	215.299.950	SLA berjalannya SIAK dan KTP-el	90 persen	220,000,000
2	12	4	2.03	7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	SLA berjalannya SIAK dan KTP-el	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Terselenggaraanya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	90 persen	12 Laporan	12 bulan	245.692.950	SLA berjalannya SIAK dan KTP-el	90 persen	255,000,000
2	12	4	2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								110.673.200			112,500,000
2	12	4	2.04	3	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	SLA berjalannya SIAK dan KTP-el	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Terselenggaranya pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang optimal	90 persen	1 Laporan	12 bulan	110.673.200	SLA berjalannya SIAK dan KTP-el	90 persen	112,500,000
2	12	5		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN								29.999.900			32,000,000
2	12	5	2.01	Penyusunan Profil Kependudukan								29.999.900			32,000,000
2	12	5	2.01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan profil kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Termanfaatkannya Profil Kependudukan oleh Perangkat Daerah	100 persen	1 Dokumen	29 PD	29.999.900	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan profil kependudukan	100 persen	32,000,000
TOTAL												11.370.058.000			11,621,059,279

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi Tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi. Rencana Kerja pada dasarnya memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi Tahun 2023 ini menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PPAS) tahun 2023 dan menjadi acuan bagi kepala Perangkat Daerah agar tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan, oleh karena itu perlu dipedomani kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui forum OPD serta forum penyelenggaraan Musrenbang ditujukan untuk mengakomodir aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam rangka penyempurnaan rancangan RKPD dan Renja OPD.
2. Peran Masyarakat diletakkan sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/Kegiatan.
3. OPD dan Unit-unit kerja serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dalam RKPD dan OPD dengan sebaik-baiknya.
4. Sebagai pedoman penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023, Renja OPD Tahun 2023 akan menjadi bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran.
5. Dalam rangka sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan Kegiatan dengan sumber pendanaan yang berbeda (APBD, APBN) maka OPD dalam membuat Renja sesuai dengan sumber anggaran.
6. Setiap Kepala OPD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan dalam mencapai efektifitas dan efisiensi dan menyampaikan hasil evaluasi triwulanan maupun Tahunan kepada Wali Kota melalui Kepala Bappeda.

7. RKPD dan Renja OPD Tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tahun 2023 diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi semua pihak serta mampu mendorong tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kota Cimahi.

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA CIMAHI**

Dra. IPAHA LATIPAH, M.Si
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19650227 199102 2 001